

PENANAMAN MODAL – WAKATOBI

2014

PERDA NO. 1, LD 2014/NO. 1: 26 HLM.

PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, maka kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara; bahwa untuk mendayagunakan potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah secara optimal dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja serta untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wakatobi diperlukan adanya penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri Maupun Penanam Modal Asing; bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, maka Kabupaten Wakatobi sebagai daerah yang menjadi destinasi pariwisata perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien melalui Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan strategi peningkatan penanaman modal melalui penataan kelembagaan, promosi potensi ekonomi, menciptakan ketentraman dan ketertiban. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal yang meliputi ruang lingkup dan jenis pelayanan, mekanisme pelayanan perizinan, layanan informasi dan layanan pengaduan. Pengendalian penanaman modal, penyelesaian sengketa, sanksi, dan ketentuan penyidikan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Mei 2014;
- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.

PENGELOLAAN SAMPAH

2014

PERDA NO. 2, LD 2014/NO. 2, TLD TAHUN 2014 NO.1: 27 HLM.

PERDA KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK :- bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Kabupaten Wakatobi tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan dan kenyamanan lingkungan, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, maka diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu oleh semua pihak;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengelolaan sampah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengaturan lembaga pengelola, ketentuan insentif dan disinsentif. Peran masyarakat yang meliputi bentuk dan tata cara. Larangan, ketentuan sanksi yang meliputi sanksi administrasi dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum, serta ketentuan penyidikan.

- CATATAN** :-
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2014;
 - Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati;
 - Penjelasan, 8 hlm.

**RETRIBUSI – PENYEDIAAN – PENYEDOTAN - KAKUS
2014**

PERDA NO. 4, LD 2014/NO. 4: 15 HLM.

**PERDA KABUPATEN WAKATOBİ TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

- ABSTRAK** : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola dan menjadi kewenangan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagai Retribusi Jasa Umum, struktur tarif retribusi didasarkan pada kapasitas volume dan jangkauan pelayanan mobil tinja. Menetapkan pemungutan retribusi yang meliputi tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, pemanfaatan, dan keberatan, serta mengatur pengembalian kelebihan pembayaran. Diatur pula tentang kadaluwarsa penagihan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban retribusi, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

- CATATAN :- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 September 2014;
- Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini tentang hal-hal tertentu memerlukan Peraturan Bupati.